

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Banyak tantangan ekonomi di Indonesia telah menyebabkan negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat, terutama karena tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, yang terus meningkat setiap tahunnya karena ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang mencari pekerjaan dengan lapangan kerja yang tersedia.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Salah satu tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan peluang kerja yang maksimal sehingga tenaga kerja dapat terserap dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Namun, di negara-negara berkembang, masalah pengangguran yang terus meningkat menjadi permasalahan yang lebih rumit dan serius daripada masalah distribusi pendapatan yang tidak merata. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, negara-negara berkembang menghadapi kesulitan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup cepat untuk menyerap pertumbuhan penduduk. Masalah pengangguran semakin menjadi perhatian serius, terutama karena tidak hanya jumlahnya yang meningkat, tetapi juga proporsi pengangguran dari total tenaga kerja semakin tinggi.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan rangkaian kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas peluang kerja dan memastikan distribusi pendapatan yang merata. Di Indonesia, salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi adalah kurangnya kesempatan kerja, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam distribusinya. Permasalahan ini

muncul karena pertumbuhan jumlah angkatan kerja tidak sejalan dengan kemampuan sektor-sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja.

Pentingnya penanganan masalah pengangguran tercermin dari potensi dampak negatifnya terhadap stabilitas sosial, seperti yang dinyatakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019. Ketidakseimbangan kondisi sosial dapat memicu ketidakstabilan yang berdampak pada aspek ekonomi. Oleh karena itu, penurunan tingkat pengangguran menjadi suatu keharusan karena memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam perspektif Islam, setiap individu diyakini memiliki jaminan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, sebagaimana yang disebutkan dalam Surah Al-Hud ayat 6.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

*Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa)[1] di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya[2]. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).*

Meskipun Allah SWT memberikan jaminan rezeki kepada semua makhluk-Nya, Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk tidak menganggur atau bersikap malas. Karena sikap tersebut dianggap tidak disukai oleh Allah SWT dan dapat berdampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap perekonomian. Untuk menghindari dampak buruk tersebut, Islam mendorong agar semua sumber daya manusia dimanfaatkan dengan melakukan usaha. Bahkan jika pekerjaan yang tersedia tergolong berat atau termasuk dalam sektor informal, tidak menjadi alasan untuk berhenti berusaha, karena lebih terhormat untuk bekerja keras daripada meminta-minta.

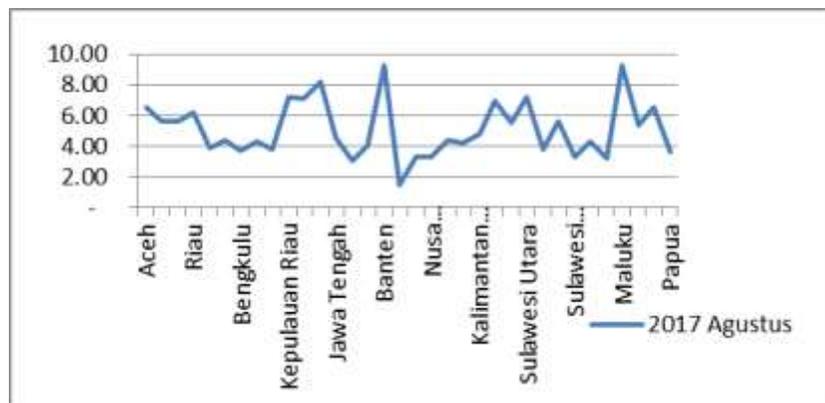
Keadaan ekonomi Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilakukan belum mampu menyediakan kesempatan kerja yang cukup cepat untuk menanggapi pertumbuhan jumlah penduduk, baik di

perkotaan, perkabupaten, maupun provinsi. Oleh karena itu, masalah pengangguran terus meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut Mankiw (2006), pengangguran dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Waktu yang dibutuhkan oleh pencari kerja untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keinginan mereka.
2. Tingkat upah yang ditentukan oleh pemerintah dapat memengaruhi tingkat pengangguran di suatu wilayah.
3. Pertumbuhan ekonomi juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat pengangguran, karena merupakan gambaran dari hasil pembangunan ekonomi suatu negara.

Indonesia, sebagai negara besar dengan ribuan pulau dan puluhan provinsi, memiliki tingkat pengangguran terbuka yang bervariasi di setiap wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dari grafik yang menunjukkan perbedaan tingkat pengangguran di setiap provinsi.



Sumber: BPS, 2018

**Gambar 1.1**  
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1, pada setiap provinsi di Indonesia memiliki tingkat pengangguran terbuka yang berbeda. Provinsi Maluku memiliki tingkat pengangguran tertinggi sebesar 9,29% sedangkan tingkat terendah di Bali sebesar 1,48%. Dilihat dari grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran yang mengalami fluktuasi yang tinggi terdapat di Pulau Jawa, berikut penjelasan tentang tingkat pengangguran terbuka di provinsi pulau jawa tahun 2015 – 2022.

**Tabel 1. 1.**  
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2015 – 2022 (%)

Provinsi	Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>DKI Jakarta</b>	11,32	10,86	10,6	9,64	9,84	8,36	5,77	5,36
<b>Jawa Barat</b>	10,57	10,01	9,84	8,88	8,66	8,40	8,57	8,49
<b>Jawa Tengah</b>	6,86	6,16	5,90	5,53	5,45	5,31	4,20	4,15
<b>DI Yogyakarta</b>	6,02	4,39	3,98	3,75	2,16	4,07	2,81	3,02
<b>Jawa timur</b>	4,91	4,24	4,16	3,97	4,02	4,31	4,14	4,10
<b>Banten</b>	14,13	13,64	10,68	9,77	9,87	8,58	7,95	9,28

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan tabel 1.1, Pada tahun 2022, terdapat fluktuasi yang signifikan dalam tingkat pengangguran terbuka di beberapa provinsi di Pulau Jawa. Berikut adalah gambaran singkat mengenai tingkat pengangguran terbuka di provinsi-provinsi tersebut:

1. Banten: Provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Pulau Jawa pada tahun 2022, dengan persentase sebesar 9,28%. Tingkat pengangguran yang tinggi ini menunjukkan adanya tantangan dalam penciptaan lapangan kerja di wilayah tersebut.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta: Sebaliknya, Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan tingkat pengangguran terbuka yang relatif rendah, hanya sebesar 3,02%. Hal ini mungkin disebabkan oleh keberhasilan program-program

pengembangan ekonomi dan pelatihan kerja yang dilakukan di wilayah tersebut.

3. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur: Provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, memiliki tingkat pengangguran terbuka dengan persentase berkisar antara 3% hingga 8%. Meskipun memiliki fluktuasi yang berbeda, semua provinsi tersebut menghadapi tantangan yang serupa dalam mengurangi tingkat pengangguran dan menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi penduduknya.

Tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020 dan 2022, terjadi peningkatan tingkat pengangguran sebesar 0,74% dan 0,30% secara berturut-turut. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perbedaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan hasil Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas) tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka menurut wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wilayah Perkotaan: Wilayah perkotaan cenderung memiliki tingkat pengangguran terbuka yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang lebih ketat di pasar tenaga kerja perkotaan serta adanya tantangan dalam menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan yang terus bertambah.
2. Wilayah Perdesaan: Meskipun tingkat pengangguran terbuka di wilayah perdesaan biasanya lebih rendah daripada di wilayah perkotaan, namun tetap ada tantangan tersendiri terkait dengan ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan di sektor-sektor ekonomi di pedesaan.

Dengan demikian, fluktuasi tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun-tahun tertentu mungkin dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan sosial di kedua wilayah tersebut..



Sumber: Sakernas, 2017

### Gambar 1.2

Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Wilayah D.I.Yogyakarta Februari 2015 – Februari 2017

Berdasarkan gambar 1.2, terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di daerah perkotaan selalu lebih tinggi daripada di daerah pedesaan. Misalnya, TPT perkotaan D.I. Yogyakarta pada Februari 2017 mencapai 3,56 persen, sedangkan TPT di daerah pedesaan hanya sebesar 1,20 persen, dengan perbedaan sebesar 2,36 persen poin. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, wilayah perkotaan cenderung memiliki lebih banyak sektor formal daripada wilayah pedesaan. Sebagian besar lapangan kerja di sektor formal membutuhkan keahlian khusus atau syarat tertentu untuk bisa bekerja, sehingga mempersulit penduduk pedesaan yang mungkin memiliki keterampilan yang lebih terbatas untuk memasuki sektor ini. Kedua, syarat dan kondisi kerja di sektor formal cenderung lebih ketat dan memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor informal. Ini membuat penduduk pedesaan yang lebih terbiasa dengan kegiatan pertanian atau sektor informal lainnya sulit untuk memenuhi persyaratan tersebut. Dengan demikian, perbedaan tingkat pengangguran antara wilayah perkotaan dan pedesaan seperti yang terlihat dalam data tersebut,

menunjukkan adanya tantangan tersendiri dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai di kedua jenis wilayah tersebut.



Sumber : BPKAD,2021

**Gambar 2.1**

#### Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar 2.1, pada tahun 2016, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Yogyakarta mencapai 5,52 persen. TPT kemudian mengalami penurunan menjadi 5,08 persen pada tahun 2017, dan terus menurun menjadi 4,80 persen pada tahun 2019. Penurunan ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat selama periode tersebut.

Namun, pada tahun 2020, terjadi peningkatan drastis dalam tingkat pengangguran terbuka (TPT), mencapai 9,16 persen. Peningkatan yang signifikan ini mencerminkan dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada tahun tersebut. Pandemi ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran secara dramatis, dari 11.694 jiwa pada tahun 2019 menjadi 22.624 jiwa pada tahun 2020.

Keadaan negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya diwarnai oleh ciri-ciri sebagai berikut: tingkat kehidupan yang rendah, tingkat pengangguran yang

meluas, tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah, tingkat penduduk yang tinggi, ketergantungan produk pertanian dan ketergantungan terhadap negara-negara maju.

Suatu perekonomian yang terjadi dinegara maju maupun negara berkembang bukan jaminan negara tersebut menjadi makmur apabila tidak diikuti dengan dengan perluasan kesempatan kerja yang setiap tahun ketahun memasuki dunia kerja. Terbatasnya permintaan kerja menjadi masalah utama suatu negara seiring dengan berubahnya makro ekonomi dinegara berkembang, angka pengangguran yang meningkat pesat, faktor-faktor eksternal seperti memburuknya kondisi neraca pembayaran, meningkatnya masalah utang yang mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan industri, tingkat upah dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Masalah pertumbuhan ekonomi sangat erat dengan pengangguran jika kondisi perekonomian baik maka otomatis penyerapan tenaga kerja juga akan baik. pengangguran merupakan masalah utama yang sering dihadapi oleh setiap negara baik itu negara maju atau negara berkembang khususnya seperti indonesia. Pengangguran memang menjadi persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian diindonesia, setiap tahun jumlah penduduk diindonesia selalu meningkat akibatnya jumlah angkatan kerja pun menjadi semakin besar. Dalam sensus penduduk tahun 2001 mendefinisikan pengangguran adalah suatu keadaan seseorang yang tergolong angkatan kerja umur (15-64 tahun) (BPS, 2001).

Tingginya tingkat pengangguran berdampak negatif terhadap suatu negara. berkaitannya dengan pendapatan yang menyebabnya seseorang yang menganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Kekacauan politik dan sosial menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat, selain itu tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak sebanding dalam penyerapan tenaga kerja. penganggur bukan juga dari orang yang tidak mencari pekerjaan, penganggur yang disebabkan pemutusan hubungan kerja juga dapat terjadi karena perusahaan

mengurangi jumlah tenaga kerjanya yang keamanannya kurang kondusif atau akibat krisis ekonomi.

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran merupakan langkah penting dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan penduduk, dan kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran yang membandingkan harapan hidup, tingkat melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk menilai kualitas hidup suatu negara. Peningkatan IPM dapat meningkatkan produktivitas manusia dan berpotensi menurunkan tingkat pengangguran.

Indikator lain yang juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengangguran yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Menurut Mankiw (2000) upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, sehingga besar kecilnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang ada. Sehingga dapat diartikan bahwa jumlah tenaga kerja yang diserap mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Upah mempunyai pengaruh terhadap angkatan kerja yang ada. Jika upah yang ditetapkan tinggi maka biaya produksi juga akan meningkat dan akan berakhir dengan perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja dan berakibat pada peningkatan jumlah pengangguran (Alghofari, 2010).

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta serta memberikan landasan bagi perumusan kebijakan yang efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **“Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta”**

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Batasan masalah menjelaskan bahwa penelitian ini hanya berfokus pada Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode tahun 2015-2022.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, perumusan masalah untuk penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Dengan merumuskan masalah tersebut, penelitian akan mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode yang diteliti. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disajikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan merumuskan tujuan penelitian tersebut, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode yang diteliti. Hal ini dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Universitas : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang berharga untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan memperluas pemahaman tentang dinamika faktor-faktor tersebut dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Instansi Pemerintah : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi yang penting bagi instansi pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan sosial yang lebih efektif. Analisis tentang hubungan antara PDRB, pertumbuhan penduduk, IPM, kemiskinan, dan tingkat pengangguran dapat menjadi dasar untuk merancang

strategi dan program yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi tingkat pengangguran.

3. Instansi Swasta : Bagi pihak swasta, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta, instansi swasta dapat menyesuaikan strategi dan kebijakan perusahaan mereka untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal dan berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran.

Dengan demikian, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan wilayah-wilayah lain di Indonesia.